

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat

Adapun Sistem informasi akuntansi persediaan dilakukan dalam pengelolaan persediaan dengan agar semakin efektif dan efisien. Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015) persediaan merupakan aset yang disediakan untuk diperdagangkan dalam hal bisnis biasa, pada tahap memproduksi untuk penjualan atau pada bentuk bahan yang akan digunakan untuk proses produksi atau pemberian jasa. Pengertian lainnya bahwa perusahaan memiliki persediaan berupa barang jadi, bahan baku, barang di dalam proses dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut (Rudianto, 2008)

Dokumen Terkait Persediaan Obat di Puskesmas Parigi Baru.

1) Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO)

Lembar isian atau formulir yang dipakai sebagai bukti pengeluaran obat di gudang farmasi Kota tangsel, permintaan atau pesanan obat dari puskesmas kepada dinkes Kota tangsel atau kota, penerimaan obat di puskesmas, dan bukti penggunaan obat yang ada. LPLPO yang dibuat oleh teknis pelayanan medis puskesmas harus di isi dengan benar dan

diserahkan dengan tepat serta diamankan dengan baik. Dengan adanya LPLPO diharapkan pemakaian obat dapat terkendali dengan baik.

2) Surat Pemesanan Obat

Surat yang berisi daftar kebutuhan obat farmasi puskesmas yang telah disetujui dan akan diberikan kepada dinkes Kota tangsel atau kota sebagai permohonan permintaan obat.

3) Daftar E-Katalog

Daftar E-Katalog memuat informasi mengenai daftar harga, spesifikasi produk, penyedia obat dan informasi lain terkait obat. Dokumen ini diperlukan oleh Puskesmas ketika melakukan pembelian obat lewat media elektronik/ *E-purchasing* melalui sistem katalog elektronik. Dengan adanya katalog elektronik dapat menjamin transparansi, efektivitas, dan efisiensi proses pengadaan obat.

Mengacu pada (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas prosedur yang sedang dilaksanakan pada pengelolaan persediaan obat dan barang medis habis pakai ialah:

1) Perencanaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Perencanaan obat dan barang medis habis pakai merupakan kegiatan awal yang dilakukan pada pengadaan obat. Perencanaan adalah

suatu kegiatan menyeleksi obat dan barang medis habis pakai untuk mengetahui serta menentukan jenis dan jumlah obat yang perlu disediakan untuk memenuhi kebutuhan Puskesmas.

Tujuan perencanaan obat adalah untuk memperoleh:

- a. Memperkirakan jenis bahan pengobatan apa saja yang dibutuhkan dan berapa jumlah bahan pengobatan yang mendekati kebutuhan Puskesmas
- b. Peningkatan atas penggunaan obat secara rasional
- c. Meningkatkan efisiensi penggunaan obat
- d. Adanya kerjasama antara penyedia anggaran dan pemakai obat sehingga dana pengadaan obat dapat lebih optimal.

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyeleksi persediaan obat dan barang medis habis pakai seperti penyakit yang sering terjadi di daerah tersebut, pola pemakaian obat berdasarkan tahap sebelumnya, data mutasi persediaan obat, rencana pengembangan serta harus mengarah pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium nasional. Proses pemilihan obat juga perlu melibatkan beberapa tenaga medis yang ada di puskesmas seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan serta pihak-pihak yang berhubungan dengan pengobatan.

Laporan Pemakaian dan Lembar Penerimaan Obat (LPLPO) diperlukan oleh pihak puskesmas untuk membuat data pemakaian obat saat melakukan perencanaan obat. Kemudian pihak farmasi Kota tangsel atau kota akan melakukan antologi dan analogi terhadap kebutuhan obat

di puskesmas. Antologi dilakukan untuk mengetahui penggunaan jenis obat setiap bulan dari setiap puskesmas selama setahun. Selain itu pihak farmasi juga akan memperhatikan biaya yang tertera serta memperhitungkan waktu kekosongan obat agar menghindari kekurangan atau kelebihan stok.

2) Permintaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Permintaan obat dengan jumlah obat yang dibutuhkan puskesmas serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat dilakukan oleh puskesmas dengan mengajukan permintaan obat ke dinkes Kota tangsel atau kota sesuai. Dengan adanya permintaan obat kepada dinkes Kota tangsel atau kota diharapkan dapat mencukupi kebutuhan obat di puskesmas sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan sehingga proses bisnis Puskesmas dapat berjalan dengan baik.

3) Penerimaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Puskesmas menerima obat dan bahan medis habis pakai dari instalasi farmasi Kota tangsel atau kota atau hasil pemasokan yang dilakukan puskesmas dengan mandiri sesuai dengan jumlah kebutuhan obat yang telah dilaporkan. Kegiatan penerimaan bertujuan supaya jenis dan jumlah obat yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh puskesmas kepada dinkes kabupaten atau kota.

Pihak yang bertanggung jawab pada penerimaan obat ialah tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian wajib melakukan penyimpanan,

pemindahan, pemeliharaan, penggunaan obat serta melakukan pencatatan. Selain itu, tenaga kefarmasian wajib melakukan pemeriksaan terhadap jumlah dan jenis obat yang diperoleh agar sesuai dengan isi dokumen LPLPO. Dokumen LPLPO yang telah sesuai dengan jumlah dan jenis obat yang diterima selanjutnya akan ditandatangani oleh tenaga kefarmasian dan diketahui oleh kepala puskesmas. Apabila jumlah dan jenis obat yang diterima puskesmas berbeda dengan dokumen LPLPO, maka tenaga kefarmasian dapat mengajukan keberatan.

4) Penyimpanan Obat dan Barang Medis Habis Pakai

Penyimpanan obat yakni suatu kegiatan menyimpan dan memelihara obat yang diperoleh pada tempat yang aman agar terhindar dari kerusakan fisik, tidak adanya kehilangan obat, dan kualitas obat selalu terjamin. Tujuan dari penyimpanan obat adalah untuk menjaga kualitas obat di puskesmas agar tetap terjamin sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati, menghindari penyalahgunaan penggunaan obat, menjaga kesinambungan persediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan obat. Untuk memudahkan pengendalian stok obat maka obat akan disimpan di rak yang telah dinamai secara alfabetis serta disusun dengan prinsip *First Expired date First Out* (FEFO) / *First In First Out* (FIFO) yaitu obat yang masa kadaluarsa nya lebih atau yang diterima lebih awal harus digunakan lebih dahulu.

Penyimpanan obat dan barang kesehatan habis pakai harus memperhitungkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Jenis obat yang ingin disimpan dan bentuk dari setiap jenis obat
- b. Memperhatikan syarat penyimpanan obat dengan melihat tanda yang ada di luar kemasan obat, seperti suhu penyimpanan, cahaya, dan kelembaban.
- c. Mengetahui kondisi obat apakah mudah disulut api
- d. Menyimpan narkoba (narkotika dan psikotropika)? Di tempat aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Barang yang dapat menyebabkan bersentuhan tidak diperbolehkan disimpan di tempat penyimpanan obat.

5) Pendistribusian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Hal ini merupakan suatu kegiatan dimana pengeluaran dan pemberian obat secara tepat dan merata untuk pemenuhan kebutuhan obat di seluruh unit pelayanan medis. Tujuan pendistribusian obat ialah untuk mencukupi kebutuhan obat di sub unit pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas dengan jumlah, mutu, jenis dan waktu yang tepat.

Beberapa sub unit di puskesmas yang akan menerima pendistribusian ialah sub unit pelayanan medis di dalam lingkungan puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, dan polindes. Sementara itu, pendistribusian obat ke ruang rawat inap, UGD (Unit Gawat Darurat) akan dilakukan dengan cara memberi obat sesuai dengan resep yang telah ditulis oleh dokter, pemberian obat per sekali minum ataupun kombinasi, sedangkan pendistribusian obat kepada jaringan puskesmas dilakukan dengan cara memberikan obat yang tepat

dengan jenis dan jumlah obat yang dibutuhkan.

6) Pemusnahan dan Penarikan

Obat-obatan dan bahan medis yang sudah habis pakai yang tidak dipakai kembali (rusak atau kadaluarsa) harus dilakukan pembinasaaan dan penarikan. Pembinasaaan dan penarikan tersebut harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat untuk obat dan bahan medis serta obat-obatan habis pakai yang dimusnahkan ialah produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, produk yang telah kadaluarsa, izin edar produk telah dicabut oleh menteri, serta produk yang tidak diperkenankan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan. Penarikan obat terhadap obat yang tidak sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan akan dilaksanakan oleh pihak yang memiliki izin pengedaran berdasarkan perintah dari BPOM atau berdasarkan inisiatif pemilik izin edar namun tetap membuat laporan kepada pihak BPOM.

Beberapa tahap kegiatan yang dilakukan dalam pemusnahan obat yaitu:

- a. Membuat daftar yang berisi jenis dan jumlah obat serta bahan medis habis pakai apa saja yang akan dimusnahkan
- b. Membuat berita acara penghancuran
- c. Mempersiapkan rencana waktu, tempat, dan metode yang digunakan untuk melakukan pemusnahan serta melakukan koordinasi kepada pihak terkait
- d. Mempersiapkan tempat penghancuran
- e. Melakukan penghancuran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7) Pengendalian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Pengendalian obat merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai dengan strategi sehingga tidak menciptakan kelebihan dan kekosongan obat. Dalam hal pengawasan dan pengendalian di puskesmas terdiri dari kegiatan pemeriksaan persediaan, pengendalian penggunaan, dan pengendalian obat hilang, rusak, dan kadaluarsa.

8) Administrasi

Administrasi merupakan kegiatan yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan data obat dan barang medis habis pakai yang diterima kemudian disimpan serta didistribusikan, maupun yang digunakan di puskesmas atau unit pelayanan lainnya. Tujuan dari pendataan dan pemberitahuan obat ialah disediakannya data mengenai jenis dan jumlah obat yang diterima, digunakan, dan yang masih tersisa sebagai stok serta dapat mengetahui data waktu dari urutan kegiatan mutasi obat. Data obat yang dihasilkan dari kegiatan pendataan dan pemberitahuan dapat digunakan untuk melakukan pengaturan dan pengendalian serta membuat laporan.

9) Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Pemantauan dan evaluasi obat di puskesmas dilaksanakan dengan *system* periodik.

Evaluasi merupakan proses untuk menentukan keberhasilan suatu

kegiatan atau usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan suatu keadaan yang diharapkan dengan keadaan yang benar-benar terjadi. Tujuan dari evaluasi ialah:

- a. Mencegah terjadinya kesalahan dalam tata kelola obat dan bahan medis habis pakai supaya kualitas dan pelayanan dapat terjaga.
- b. Memperbaiki proses pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai secara terus menerus.
- c. Memberikan penghargaan terhadap hasil kinerja pengelolaan.

2.2 Sistem Pengendalian Internal.

Menurut (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), 2013) terdapat lima unsur pengendalian internal yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan seperangkat standar, proses, dan struktur sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi. Terdapat lima prinsip yang harus dijalankan untuk mendukung lingkungan pengendalian yaitu:

- a. Organisasi harus memiliki komitmen untuk berintegritas serta memiliki nilai-nilai etika.
- b. Dewan direksi menunjukan kebijaksanaan dari manajemen dan latihan yang mengawasi perkembangan dari kinerjanya.
- c. Manajemen menetapkan struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang tepat untuk mencapai tujuan.

- d. Organisasi menunjukan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan.
- e. Organisasi meminta pertanggungjawaban individu atas tanggung jawab pengendalian internal dalam mencapai tujuan.

2) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengurangi risiko dalam mencapai tujuan melalui kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Aktivitas pengendalian dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan seperti otorisasi, rekonsiliasi, verifikasi, analisis, prestasi kerja, dan lain-lain. Terdapat tiga prinsip yang mendukung aktivitas pengendalian yaitu:

- a. Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi meminimalkan risiko atas pencapaian sasaran pada tingkat yang dapat diterima.
- b. Memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.
- c. Organisasi memberlakukan aktivitas pengendalian melalui ketetapan yang diharapkan dan melalui prosedur yang menjabarkan kebijakan menjadi Tindakan.

3) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Risiko merupakan suatu kejadian yang mungkin terjadi dan akan mempengaruhi suatu entitas untuk mencapai tujuan. Penilaian risiko dilakukan secara berulang dan dinamis untuk dapat menemukan dan menilai risiko yang

mungkin akan terjadi dalam mencapai tujuan. Terdapat empat prinsip yang mendukung penilaian risiko yaitu:

- a. Organisasi membuat tujuan yang jelas dan cukup untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan tujuan.
- b. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
- c. Organisasi mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam menilai risiko.
- d. Mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan pada sistem pengendalian internal.

4) Informasi dan Komunikasi (information and communication)

Informasi memiliki peran penting bagi entitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas yang berasal dari internal dan eksternal. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan terjadi secara terus-menerus. Terdapat tiga prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi yaitu:

- a. Organisasi Memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan serta berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian internal.

- b. Secara internal, organisasi mengkomunikasikan informasi, baik tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal agar mendukung fungsi dari pengendalian internal.
- c. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

5) Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities)

Aktivitas pemantauan terdiri dari beberapa bentuk kegiatan evaluasi yaitu evaluasi yang sedang berlangsung, evaluasi terpisah, atau beberapa kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Kegiatan pemantauan dapat dilakukan dengan menilai kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu serta memastikan apakah pengendalian sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan dan menyesuaikan dengan perubahan keadaan. Kegiatan pemantauan sebaiknya dilaksanakan oleh satu personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Pengendalian internal terhadap persediaan menjadi hal yang sulit dalam manajemen dikarenakan banyaknya ancaman yang mengakibatkan persediaan tidak dapat dihitung dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu prosedur pengendalian seperti yang dijelaskan oleh (Romney & Steinbart, 2015).